

Persepsi Umkm Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha

Awaludin^{1*}, Yusrizal²

^{1*,2}Universitas Mataram, Mataram, Indonesia

*email: awaludin323@gmail.com

Article Info

Article history:

Received Month 05, 2025

Approved Month , 06, 2025

ABSTRAK

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun demikian, keberhasilan UMKM dalam menjalankan usahanya tidak terlepas dari peran aktif pemerintah daerah dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif melalui berbagai kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha mereka. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan studi dokumentasi pada sejumlah pelaku UMKM di wilayah tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan pemerintah daerah bersifat variatif, bergantung pada sektor usaha, akses informasi, dan intensitas komunikasi antara pelaku UMKM dengan pemerintah daerah. Beberapa kebijakan seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan modal, serta penyediaan fasilitas promosi dinilai positif, namun masih banyak pelaku UMKM yang mengeluhkan proses birokrasi yang rumit, kurangnya pendampingan berkelanjutan, serta belum meratanya distribusi program. Ditemukan pula bahwa UMKM yang tergabung dalam komunitas atau asosiasi cenderung lebih mengetahui dan memanfaatkan kebijakan yang ada dibandingkan UMKM yang beroperasi secara mandiri. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah daerah untuk meningkatkan sosialisasi kebijakan, menyederhanakan prosedur administratif, serta membangun kolaborasi yang berkelanjutan dengan pelaku UMKM demi terciptanya ekosistem usaha yang inklusif dan berdaya saing.

Keywords: UMKM, kebijakan pemerintah daerah, persepsi, pengembangan usaha, kolaborasi.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Example: Awaludin, A, & Yusrizal, Y. (2025). Persepsi Umkm Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pengembangan Usaha. *Indonesian Journal Journal of Applied Economics and Business Global*, 1(1), 8–15. <https://doi.org/10.55681/ijereg.v1i1.33>

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki posisi strategis dalam struktur perekonomian Indonesia. UMKM tidak hanya menjadi tulang punggung ekonomi

Write 4 words for the title of the article ... -8

nasional, tetapi juga berperan dalam pemerataan pendapatan dan penyerapan tenaga kerja. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, pada tahun 2023 UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional serta menyerap lebih dari 97% tenaga kerja nasional (Kemenkop UKM, 2023). Hal ini menunjukkan betapa pentingnya peran UMKM dalam pembangunan ekonomi nasional, khususnya di tingkat daerah.

Namun, dalam menghadapi dinamika perekonomian, UMKM sering kali menghadapi berbagai kendala yang menghambat perkembangan usaha mereka. Beberapa permasalahan yang umum ditemui antara lain keterbatasan akses terhadap pembiayaan, rendahnya kualitas sumber daya manusia, kesulitan dalam pemasaran, serta keterbatasan teknologi dan inovasi. Untuk itu, intervensi pemerintah daerah menjadi penting sebagai bentuk dukungan terhadap UMKM dalam mengatasi berbagai tantangan tersebut (Tambunan, 2019).

Pemerintah daerah memiliki peran signifikan dalam menciptakan kebijakan yang mendukung pengembangan UMKM. Kebijakan ini dapat berupa pemberian pelatihan, penyediaan bantuan permodalan, fasilitasi pameran produk, serta penguatan kelembagaan usaha. Menurut Supriyanto (2022), kebijakan daerah yang pro-UMKM mampu meningkatkan kinerja usaha secara signifikan, terutama jika disertai dengan pengawasan dan evaluasi yang berkelanjutan.

Meski demikian, implementasi kebijakan tersebut tidak selalu berjalan efektif. Banyak pelaku UMKM yang merasa belum mendapatkan manfaat langsung dari kebijakan yang ada. Hal ini bisa disebabkan oleh kurangnya informasi, birokrasi yang berbelit, hingga kurangnya pendampingan. Oleh karena itu, memahami persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan pemerintah daerah menjadi penting sebagai evaluasi atas efektivitas kebijakan yang telah dijalankan.

Persepsi merupakan kunci dalam menilai keberhasilan suatu kebijakan, karena persepsi mencerminkan bagaimana kebijakan tersebut dipahami, diterima, dan dimanfaatkan oleh sasaran kebijakan. Menurut teori komunikasi kebijakan, persepsi masyarakat terhadap suatu program atau kebijakan sangat dipengaruhi oleh proses komunikasi, konteks sosial, dan pengalaman partisipatif individu (Dunn, 2018). Dalam konteks ini, persepsi UMKM terhadap kebijakan daerah merupakan indikator awal efektivitas kebijakan.

Beberapa penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa persepsi positif terhadap kebijakan daerah dapat mendorong partisipasi aktif pelaku usaha dalam program pemerintah, yang pada gilirannya berdampak pada peningkatan kinerja usaha. Misalnya, penelitian oleh Ramadhan dan Putri (2021) menunjukkan bahwa UMKM yang memahami manfaat kebijakan bantuan modal cenderung lebih berhasil meningkatkan skala usahanya dibandingkan dengan UMKM yang tidak memanfaatkan kebijakan tersebut. Namun, penting pula untuk dicatat bahwa persepsi tidak selalu mencerminkan realitas objektif dari kebijakan itu sendiri. Dalam banyak kasus, persepsi terbentuk berdasarkan informasi yang terbatas atau pengalaman pribadi yang bersifat subyektif. Oleh karena itu, penelitian ini tidak hanya penting untuk mengukur persepsi, tetapi juga menjadi dasar untuk memahami hambatan komunikasi dan pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Dengan memahami persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan daerah, pemerintah daerah diharapkan dapat melakukan perbaikan baik dari sisi substansi maupun proses implementasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan prinsip pembangunan

partisipatif, di mana kebijakan publik disusun dan dilaksanakan dengan mempertimbangkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat secara langsung.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji persepsi UMKM terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah dalam merumuskan kebijakan yang lebih responsif dan aplikatif bagi perkembangan UMKM.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk menggambarkan secara mendalam persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha. Pendekatan kualitatif dipilih karena mampu menggali makna, pandangan, dan pengalaman subjektif pelaku UMKM secara lebih komprehensif. Menurut Moleong (2017), penelitian kualitatif bertujuan untuk memahami fenomena sosial dari perspektif partisipan melalui pendekatan alamiah tanpa manipulasi variabel, sehingga sangat relevan untuk menjelaskan persepsi dan pengalaman pelaku usaha dalam konteks kebijakan publik.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung di lapangan, dan dokumentasi terhadap kebijakan pemerintah daerah yang relevan. Informan dalam penelitian ini adalah pelaku UMKM yang tersebar di berbagai sektor usaha, seperti kuliner, kerajinan, dan jasa, yang dipilih secara purposive berdasarkan kriteria keterlibatan mereka dalam program kebijakan daerah. Selain itu, wawancara juga dilakukan dengan perwakilan dari Dinas Koperasi dan UMKM setempat untuk memperoleh perspektif kelembagaan. Hal ini sejalan dengan pendapat Sugiyono (2021) bahwa purposive sampling merupakan teknik yang lazim digunakan dalam penelitian kualitatif untuk mendapatkan informasi yang mendalam dari narasumber yang dianggap mengetahui persoalan secara langsung.

Analisis data dilakukan dengan metode interaktif yang mencakup reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Proses ini dilakukan secara simultan selama proses pengumpulan data berlangsung. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis secara tematik untuk mengidentifikasi pola-pola persepsi dan respon terhadap kebijakan pemerintah daerah. Teknik triangulasi digunakan untuk meningkatkan validitas data dengan membandingkan temuan dari berbagai sumber data. Seperti dijelaskan oleh Lexy J. Moleong (2017), validitas dalam penelitian kualitatif lebih menekankan pada konsistensi makna dan keabsahan penafsiran yang diperoleh melalui berbagai sumber dan teknik.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini menemukan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha sangat bervariasi dan dipengaruhi oleh beberapa faktor kunci, seperti jenis usaha yang dijalankan, latar belakang pendidikan pelaku usaha, serta tingkat keterlibatan mereka dalam berbagai program pemerintah. Misalnya, pelaku UMKM di sektor perdagangan dan jasa cenderung memiliki pengalaman dan persepsi yang berbeda dibandingkan dengan pelaku di sektor produksi atau kerajinan, karena karakteristik

kebutuhan usaha yang tidak sama. Sebagian besar pelaku UMKM mengaku mengetahui adanya berbagai program dukungan yang ditawarkan pemerintah daerah, termasuk pelatihan kewirausahaan untuk peningkatan kapasitas manajerial, bantuan permodalan dalam bentuk pinjaman lunak atau hibah, serta fasilitasi promosi produk melalui pameran dan platform digital. Meski demikian, hanya sebagian kecil dari mereka yang menyatakan bahwa kebijakan tersebut benar-benar memberikan dampak positif yang signifikan terhadap pertumbuhan dan keberlanjutan usaha mereka. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan yang dirancang dengan harapan pemerintah dan realitas implementasinya di lapangan. Persepsi tersebut juga dipengaruhi oleh faktor aksesibilitas, di mana pelaku UMKM yang lebih sering terlibat dalam program pemerintah biasanya lebih mampu memanfaatkan kesempatan yang ada, sementara pelaku yang kurang terinformasi atau tidak aktif cenderung merasa kebijakan kurang relevan atau efektif. Oleh karena itu, keberhasilan kebijakan pengembangan UMKM sangat bergantung pada kemampuan pemerintah daerah dalam menjangkau, memahami kebutuhan spesifik, dan memberikan layanan yang sesuai dengan karakteristik masing-masing pelaku usaha.

Salah satu temuan utama dari penelitian ini adalah bahwa efektivitas kebijakan sangat dipengaruhi oleh sejauh mana informasi tentang program pemerintah dapat diakses oleh pelaku UMKM. Banyak pelaku usaha yang merasa tidak dilibatkan secara langsung dalam sosialisasi atau konsultasi kebijakan. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian Ramli (2020), yang menyebutkan bahwa kurangnya komunikasi dua arah antara pemerintah daerah dan pelaku UMKM menjadi salah satu penghambat utama dalam implementasi kebijakan pengembangan usaha (Ramli, 2020).

Beberapa pelaku UMKM yang diwawancarai mengungkapkan bahwa program pelatihan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah sering kali bersifat formalistik, hanya sekadar memenuhi kewajiban program tanpa mempertimbangkan efektivitas implementasinya di lapangan. Materi pelatihan yang diberikan cenderung terlalu teoritis dan umum, seperti penjelasan dasar-dasar manajemen usaha, akuntansi, atau pemasaran, yang tidak kontekstual dengan kebutuhan spesifik sektor usaha yang mereka jalani. Misalnya, pelaku usaha makanan ringan merasa pelatihan tidak menyentuh aspek penting seperti manajemen stok bahan baku atau pengemasan produk sesuai standar pasar modern. Selain itu, waktu pelaksanaan pelatihan sering kali tidak fleksibel dan berlangsung pada jam operasional, sehingga menyulitkan pelaku UMKM untuk berpartisipasi aktif. Bahkan, dalam beberapa kasus, pelatihan hanya berlangsung dalam waktu singkat dan tidak disertai dengan sesi praktik atau tindak lanjut, sehingga peserta kesulitan menerapkan ilmu yang diperoleh dalam operasional usahanya. Sebagaimana dikemukakan oleh Wibowo dan Sari (2019), program pelatihan yang tidak berbasis kebutuhan riil pelaku usaha cenderung tidak memberikan dampak signifikan terhadap peningkatan kapasitas maupun keberlanjutan usaha. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pelatihan berbasis kebutuhan (*needs-based training*), yang tidak hanya menyesuaikan materi dengan karakteristik sektor usaha, tetapi juga melibatkan pelaku UMKM dalam proses perancangan dan evaluasi program agar pelatihan benar-benar memberikan nilai tambah dalam praktik bisnis mereka sehari-hari.

Di sisi lain, pelaku UMKM yang tergabung dalam komunitas atau asosiasi cenderung lebih mendapatkan akses informasi, fasilitas program, serta peluang kolaborasi dibandingkan pelaku yang menjalankan usahanya secara individu. Keberadaan komunitas memberikan ruang bagi para pelaku usaha untuk saling berbagi pengalaman, sumber daya, serta menjalin kemitraan strategis yang dapat memperkuat posisi tawar mereka di hadapan pemerintah maupun pasar. Komunitas atau asosiasi juga berperan sebagai jembatan komunikasi antara pelaku UMKM dan pemerintah daerah, tidak hanya dalam hal penyebaran informasi program dan pelatihan, tetapi juga dalam menjembatani kebutuhan dan aspirasi pelaku usaha agar dapat

terakomodasi dalam perumusan kebijakan publik. Dalam beberapa kasus, asosiasi bahkan aktif dalam merancang program kerja sama dengan instansi terkait dan menjadi mitra resmi pemerintah dalam pelaksanaan pelatihan, pameran produk, dan fasilitasi sertifikasi usaha. Fenomena ini menunjukkan pentingnya penguatan kelembagaan UMKM sebagai bagian dari strategi pengembangan yang berkelanjutan. Tanpa wadah yang solid, banyak pelaku usaha kecil yang terisolasi dari informasi dan dukungan struktural, sehingga kurang mampu berkembang secara optimal. Oleh karena itu, pemerintah daerah perlu mendorong pembentukan dan penguatan komunitas UMKM di tingkat lokal melalui pembinaan organisasi, insentif kelembagaan, serta pelibatan aktif dalam proses perencanaan dan evaluasi kebijakan. Kelembagaan yang kuat tidak hanya meningkatkan efektivitas program, tetapi juga memperkuat ketahanan kolektif UMKM dalam menghadapi dinamika pasar dan tantangan ekonomi regional.

Terkait bantuan permodalan, persepsi pelaku UMKM pun beragam dan mencerminkan ketimpangan yang masih cukup mencolok dalam implementasi kebijakan pendanaan. Sebagian pelaku UMKM menyatakan telah menerima bantuan modal dari pemerintah daerah, baik dalam bentuk hibah langsung, subsidi bunga kredit, maupun pinjaman lunak melalui lembaga keuangan daerah atau koperasi mitra pemerintah. Namun, sebagian besar lainnya belum pernah merasakan akses bantuan tersebut, meskipun mereka telah menjalankan usaha selama bertahun-tahun dan mengikuti prosedur yang disyaratkan. Ketimpangan ini menunjukkan bahwa masih terdapat hambatan serius dalam proses distribusi bantuan, mulai dari keterbatasan kuota program, minimnya transparansi mekanisme seleksi, hingga kurangnya pendampingan teknis dalam proses pengajuan. Dalam penelitian yang dilakukan oleh Setiawan (2021), disebutkan bahwa birokrasi yang panjang, rumit, dan kurang transparan sering kali menjadi kendala utama dalam akses permodalan bagi UMKM, terutama bagi mereka yang tidak memiliki jaringan atau afiliasi dengan lembaga tertentu. Akibatnya, pelaku usaha kecil yang benar-benar membutuhkan bantuan modal justru tersisih oleh mereka yang lebih dekat secara struktural atau memiliki informasi lebih awal. Kondisi ini menimbulkan kesan eksklusivitas dalam program bantuan dan menurunkan kepercayaan UMKM terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mendorong pemerataan ekonomi. Oleh karena itu, dibutuhkan sistem pendanaan yang lebih inklusif, transparan, dan berbasis kebutuhan nyata pelaku UMKM, serta disertai dengan mekanisme pengawasan dan evaluasi yang melibatkan masyarakat secara aktif.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa banyak pelaku UMKM menilai pemerintah daerah belum optimal dalam hal promosi dan pemasaran produk lokal. Dukungan terhadap akses pasar, baik secara offline melalui pameran maupun online melalui marketplace, masih dianggap belum merata. UMKM di wilayah perkotaan cenderung lebih mendapatkan fasilitas tersebut dibandingkan UMKM di pedesaan. Ketimpangan ini menimbulkan kesenjangan perkembangan antarwilayah, yang dalam jangka panjang dapat memengaruhi daya saing pelaku usaha kecil.

Beberapa pelaku usaha memberikan masukan agar pemerintah daerah lebih fokus pada pendampingan berkelanjutan dibandingkan hanya mengadakan pelatihan sesaat. Mereka menginginkan adanya fasilitator atau mentor yang mendampingi usaha mereka secara langsung dalam jangka waktu tertentu. Pendampingan intensif dinilai lebih berdampak karena memungkinkan pelaku usaha belajar secara kontekstual dan berbasis masalah nyata.

Dari segi regulasi, pelaku UMKM juga menyampaikan berbagai keluhan terkait proses perizinan usaha yang masih dianggap rumit dan menyulitkan, meskipun pemerintah telah meluncurkan sistem Online Single Submission (OSS) sebagai bentuk digitalisasi layanan perizinan. Sistem ini pada dasarnya dirancang untuk mempermudah dan mempercepat proses perizinan usaha secara terintegrasi, namun dalam praktiknya masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan. Beberapa pelaku UMKM mengaku mengalami kesulitan dalam

mengakses dan mengoperasikan platform OSS karena kurangnya pemahaman tentang teknologi digital, keterbatasan perangkat, serta jaringan internet yang tidak stabil, terutama di daerah pinggiran dan pedesaan. Hal ini diperparah oleh minimnya pendampingan teknis atau pelatihan penggunaan sistem dari pemerintah daerah kepada pelaku usaha mikro dan kecil. Akibatnya, banyak pelaku usaha yang terpaksa menggunakan jasa pihak ketiga untuk mengurus izin dengan biaya tambahan, yang justru membebani mereka secara finansial. Menurut Prasetyo dan Lestari (2020), kebijakan digitalisasi perizinan seperti OSS belum sepenuhnya inklusif karena masih belum mempertimbangkan disparitas akses teknologi dan literasi digital di kalangan pelaku UMKM, khususnya mereka yang berada di daerah tertinggal dan memiliki tingkat pendidikan yang rendah. Oleh karena itu, keberhasilan sistem OSS tidak hanya ditentukan oleh kecanggihan teknologinya, tetapi juga oleh dukungan sistemik berupa pelatihan, infrastruktur, dan pendampingan yang merata di semua wilayah agar digitalisasi benar-benar menjadi solusi, bukan hambatan baru bagi pelaku UMKM.

Meski demikian, terdapat pula pelaku UMKM yang memberikan apresiasi positif terhadap komitmen pemerintah daerah dalam mendukung pengembangan usaha mikro dan kecil. Mereka mengungkapkan bahwa sejumlah kebijakan yang diterapkan, seperti pembebasan retribusi daerah, penyediaan ruang usaha gratis atau dengan biaya sangat terjangkau di pusat-pusat bisnis strategis, serta berbagai insentif pajak dan kemudahan administrasi, telah secara nyata membantu meringankan beban operasional dan meningkatkan daya saing usaha mereka. Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya memberikan dampak langsung berupa pengurangan biaya tetap, tetapi juga membuka peluang bagi UMKM untuk mengalokasikan sumber daya lebih banyak pada pengembangan produk dan pemasaran. Para pelaku usaha yang merasakan manfaat tersebut cenderung memiliki motivasi lebih tinggi untuk terus mengembangkan usahanya dan berpartisipasi dalam program-program pemerintah lainnya. Kondisi ini memperlihatkan bahwa kebijakan pemerintah daerah dapat memberikan dampak signifikan jika pelaksanaan program dilakukan secara konsisten, terarah, dan didukung oleh mekanisme monitoring yang efektif. Selain itu, keberhasilan kebijakan juga dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam menjangkau berbagai segmen UMKM serta menyesuaikan bantuan dengan karakteristik dan kebutuhan usaha yang beragam. Dengan demikian, dukungan kebijakan yang berkelanjutan dan adaptif merupakan faktor kunci dalam menciptakan ekosistem usaha yang kondusif dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal yang inklusif (Lubis & Sinaga, 2024). Analisis terhadap kebijakan juga menunjukkan bahwa belum adanya mekanisme evaluasi yang efektif dari sisi pelaku usaha. Pemerintah daerah lebih sering melakukan evaluasi internal tanpa melibatkan pelaku UMKM secara langsung. Padahal, keterlibatan UMKM dalam evaluasi akan memberikan data yang lebih akurat mengenai implementasi kebijakan di lapangan.

Implikasi dari temuan ini menunjukkan bahwa persepsi UMKM terhadap kebijakan pemerintah daerah bukan hanya sekadar cerminan dari isi kebijakan itu sendiri, tetapi juga mencerminkan kualitas komunikasi, distribusi informasi, dan hubungan antara pemangku kebijakan dan pelaku usaha. Oleh karena itu, pendekatan partisipatif dan responsif dalam perumusan dan implementasi kebijakan menjadi sangat penting untuk meningkatkan kepercayaan dan keterlibatan UMKM.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menegaskan bahwa keberhasilan kebijakan pemerintah daerah dalam mendukung UMKM sangat bergantung pada keterlibatan aktif para pelaku usaha, efektivitas komunikasi kebijakan, dan kejelasan implementasi di tingkat operasional. Pemerintah daerah perlu membangun mekanisme kebijakan yang adaptif, terukur, dan berbasis kebutuhan agar dapat benar-benar mendorong pertumbuhan dan kemandirian UMKM secara berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi pelaku UMKM terhadap kebijakan pemerintah daerah dalam pengembangan usaha sangat beragam dan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti akses informasi, keterlibatan dalam komunitas, pengalaman langsung terhadap program, serta efektivitas komunikasi antara pemerintah dan pelaku usaha. Sebagian pelaku UMKM menilai adanya kebijakan yang membantu, seperti pelatihan kewirausahaan, bantuan permodalan, dan penyediaan fasilitas promosi. Namun, pelaksanaan kebijakan tersebut dinilai belum merata dan belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan riil di lapangan. Masalah birokrasi, ketidaksesuaian materi pelatihan, minimnya pendampingan, serta kurangnya pemerataan informasi menjadi hambatan utama yang memengaruhi persepsi negatif terhadap kebijakan yang ada. UMKM yang tergabung dalam asosiasi atau komunitas cenderung memiliki persepsi lebih positif karena lebih mudah mengakses informasi dan peluang program pemerintah.

Dengan demikian, penting bagi pemerintah daerah untuk memperbaiki pendekatan kebijakan dengan mengutamakan prinsip partisipatif, inklusif, dan responsif terhadap kebutuhan pelaku usaha. Pemerintah daerah perlu melakukan penyederhanaan prosedur administrasi, memperluas jangkauan informasi dan sosialisasi kebijakan, serta memperkuat sistem pendampingan yang berkelanjutan. Di samping itu, evaluasi kebijakan harus melibatkan UMKM secara aktif agar dapat mencerminkan kondisi dan tantangan nyata yang dihadapi di lapangan. Ke depan, keberhasilan pengembangan UMKM tidak hanya bergantung pada substansi kebijakan, tetapi juga pada sejauh mana pelaku usaha merasa dilibatkan, didengar, dan difasilitasi secara adil dan berkesinambungan. Persepsi yang positif terhadap kebijakan pemerintah daerah akan menjadi kunci untuk meningkatkan partisipasi UMKM dalam pembangunan ekonomi lokal yang lebih kuat dan berdaya saing.

DAFTAR PUSTAKA

- Dunn, W. N. (2018). *Pengantar Analisis Kebijakan Publik* (Edisi 5). Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Kemenkop UKM. (2023). *Data UMKM Tahun 2023*. Jakarta: Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia.
<https://kemenkopukm.go.id/uploads/laporan/Data-UMKM-2023.pdf>
- Lubis, P. S. A., & Sinaga, S. S. (2024). Inovasi teknologi dan transformasi ekonomi: Peran kewirausahaan dalam pembangunan ekonomi daerah. *Jurnal Ekonomi, Bisnis dan Manajemen*, 3(1), 281-290.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Prasetyo, B., & Lestari, N. (2020). Digitalisasi Layanan Perizinan Usaha Mikro di Era Industri 4.0. *Jurnal Administrasi Publik*, 8(1), 45–58. <https://doi.org/10.22146/jap.2020.8.1.45>
- Ramadhan, F., & Putri, A. (2021). Persepsi UMKM terhadap Program Bantuan Modal Pemerintah Daerah di Kota Padang. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Indonesia*, 6(2), 134–144. <https://doi.org/10.31227/jebi.v6i2.134>
- Ramli, H. (2020). Efektivitas Komunikasi Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Kebijakan dan Administrasi Publik*, 4(2), 78–89. <https://doi.org/10.14710/jkap.4.2.2020.78-89>

- Setiawan, R. (2021). Kendala Akses Permodalan bagi UMKM di Indonesia: Perspektif Pelaku Usaha. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan Daerah*, 12(1), 112–125. <https://doi.org/10.25077/jepd.12.1.2021.112-125>
- Sugiyono. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Supriyanto, B. (2022). Analisis Kebijakan Pemerintah Daerah dalam Pengembangan UMKM: Studi Kasus di Kabupaten Sleman. *Jurnal Ilmu Administrasi dan Kebijakan Publik*, 9(1), 55–70. <https://doi.org/10.22146/jiarp.2022.9.1.55>
- Tambunan, T. (2019). *Uaha Mikro, Kecil dan Menengah di Indonesia: Isu-Isu Penting*. Jakarta: LP3ES.
- Wibowo, A., & Sari, M. (2019). Evaluasi Program Pelatihan Kewirausahaan Pemerintah Daerah terhadap Peningkatan Kapasitas UMKM. *Jurnal Ilmu Manajemen dan Bisnis*, 7(2), 90–101. <https://doi.org/10.24912/jimb.v7i2.90>